

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pertumbuhan ekonomi memiliki prioritas utama dalam melaksanakan perencanaan maupun pelaksanaan pembangunan baik dalam ruang lingkup negara maupun daerah. Pertumbuhan ekonomi merupakan kondisi dimana meningkatnya nilai produksi barang dan jasa disebuah negara pada rentang waktu tertentu dengan beberapa indikator, diantaranya indikator pendapatan nasional, pendapatan masyarakat perkapita, angka partisipasi yang lebih besar daripada angka pengangguran serta menurunnya tingkat kemiskinan pada suatu wilayah (Nasir & Abdul Jamal, 2019). Pada pengertian lainnya pertumbuhan ekonomi ditandai dengan berkembangnya aktivitas ekonomi yang berakibat pada bertambahnya volume barang dan jasa yang dihasilkan serta diiringi dengan kesejahteraan masyarakat yang meningkat (Sukirno, 2004).

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan juga sebagai peningkatan *output* masyarakat karena terdapat peningkatan jumlah faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi masyarakat tanpa adanya perubahan teknologi produksi itu sendiri (Schumpeter, 2021). Agar dapat mengetahui apakah sebuah wilayah memiliki pembangunan dan pertumbuhan ekonomi yang baik dapat kita lihat melalui tingkat Indeks Pembangunan Manusia (IPM) wilayahnya, United Nations Development Program (UNDP) menerbitkan konsep IPM sebagai indikator yang memberikan ukuran mengenai dimensi pembangunan yang terdiri dari dimensi kesehatan, dimensi pendidikan dan dimensi daya beli. Tingginya IPM menunjukkan bahwa kemampuan masyarakat untuk menyerap pertumbuhan ekonomi yang berkaitan dengan sarana maupun teknologi dalam upaya mencapai pertumbuhan ekonomi dapat dikatakan cukup baik (Brata, 2002).

Terdapat berbagai faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, salah satunya ialah kemampuan daya beli atau *purchasing power*. Kemampuan daya beli merupakan kemampuan konsumen memperoleh barang yang diminta dengan tingkat pendapatan serta rentang waktu tertentu (Putong, 2015). Lebih lanjut berdasarkan Oxford Dictionary of Economics, daya beli adalah “*The amount of real goods and services each unit of money will buy. Purchasing power is thus the reciprocal of a suitable price index, if prices go up, the purchasing power of money goes down.*” (Hashimzade et al., 2017). Dari pengertian tersebut menjelaskan bahwasannya daya beli merupakan sejumlah barang dan jasa yang diperoleh dengan uang. Kemampuan daya beli berkebalikan dengan indeks harga yang sesuai, apabila terjadi kenaikan harga maka kemampuan daya beli pun akan mengalami penurunan.

Kemampuan daya beli memiliki keterkaitan yang erat dengan inflasi dan pendapatan serta pengeluaran masyarakat. Menurunnya daya beli masyarakat diakibatkan turunnya pendapatan secara riil (Putong, 2015). Maka dari itu tingkat inflasi perlu dijaga kestabilannya dikarenakan tingginya angka inflasi dapat berdampak negatif terhadap ekonomi masyarakat. Adanya inflasi menimbulkan ketidakpastian bagi pelaku ekonomi karena ketidakstabilan harga yang ada berpengaruh terhadap pengambilan keputusan dalam melaksanakan kegiatan ekonomi seperti kegiatan konsumsi, investasi, serta produksi yang akhirnya berujung pada penurunan pertumbuhan ekonomi dikarenakan melemahnya kegiatan ekonomi masyarakat (Bank Indonesia, 2020)

Berbagai permasalahan yang terjadi pada sektor ekonomi termasuk mengenai peningkatan kemampuan daya beli masyarakat pada dasarnya tidak hanya menjadi tugas pemerintah pusat saja. Sejak diberlakukannya asas desentralisasi atau yang lebih kita kenal dengan otonomi daerah, pemerintah memberikan keleluasaan untuk memiliki kewenangan yang begitu luas kepada daerah. Namun demikian adanya kewenangan ini juga tentunya menjadi tantangan yang menuntut pemerintah daerah untuk melaksanakan

pemerintahan dengan penuh tanggung jawab. Untuk itu tentunya kesiapan dari aspek Sumber Daya Manusia (SDM), dalam hal keuangan dan persiapan sarana dan prasarana harus turut serta diperhatikan (MD, 2003).

Sejalan dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, pemerintah daerah diberi keleluasaan dalam merencanakan, menganggarkan, melaksanakan, menatausahakan, melaporkan, mempertanggungjawabkan dan melakukan pengawasan keuangan daerah. Pemerintah daerah diberikan keleluasaan untuk membuat instrumen kebijakan yang dapat diimplementasikan oleh satuan kerja perangkat daerah atau pun masyarakat dalam upaya merealisasikan tujuan dan sasaran pembangunan. Salah satu contoh instrumen kebijakan yang digunakan oleh pemerintah daerah dalam upaya untuk mendorong kemampuan daya beli masyarakat dapat kita lihat pada Keputusan Bupati Sumedang Nomor 505 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang.

Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) merupakan tim yang bertugas sebagai wadah koordinasi yang memiliki peran strategis dalam mendukung pencapaian sasaran inflasi yang rendah dan stabil di daerah. Berdasarkan Keputusan Bupati Sumedang Nomor 505 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah Kabupaten Sumedang. TPID Kabupaten Sumedang memiliki berbagai tugas utama salah satunya ialah melakukan pengumpulan data dan informasi perkembangan harga barang kebutuhan pokok dan penting serta jasa pada tingkat Kabupaten Sumedang, serta Menyusun kebijakan pengendalian inflasi pada tingkat Kabupaten Sumedang dengan memperhatikan kebijakan pengendalian inflasi nasional dan pengendalian inflasi pada tingkat provinsi. Adanya upaya pengendalian inflasi daerah di Kabupaten Sumedang merupakan wujud pengelolaan keuangan daerah yang sejalan juga dengan salah satu misi Kepala Daerah Kabupaten Sumedang untuk memenuhi kebutuhan dasar secara mudah dan terjangkau

untuk kesejahteraan masyarakat yang tercantum dalam Rencana Aksi Daerah (RAD) Kabupaten Sumedang.

Kabupaten Sumedang termasuk kedalam salah satu kabupaten di Provinsi Jawa Barat dengan jumlah kecamatan sebanyak 26 kecamatan, 277 desa/kelurahan serta luas wilayah seluas 1.558,72 km². Secara administratif wilayah Kabupaten Sumedang di sebelah utara berbatasan langsung dengan Kabupaten Indramayu dan Kabupaten Subang, Kabupaten Garut di sebelah selatan, Kota Bandung dan Kabupaten Subang di sebelah barat dan Kabupaten Majalengka di sebelah timur.

Grafik 1.1 Jumlah Penduduk Kabupaten Sumedang Menurut Jenis Kelamin dan Kelompok Umur Tahun 2021



Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (diolah peneliti), diakses pada 15 Januari 2023

Kabupaten Sumedang memiliki populasi penduduk sebanyak 1.152.507 jiwa dengan kerapatan penduduk sebanyak 739 jiwa per km². Berdasarkan Grafik 1.1 jumlah penduduk menurut kelompok umur menunjukkan bahwasannya Kabupaten Sumedang didominasi oleh penduduk usia muda. Dominasi penduduk usia muda yang terdapat di Kabupaten Sumedang tentunya menjadi keuntungan sekaligus tantangan tersendiri. Dari segi keuntungan,

Kabupaten Sumedang memiliki potensi yang besar dengan banyaknya aset Sumber Daya Manusia (SDM) dari kelompok usia produktif, namun tentu yang menjadi tantangannya ialah bagaimana Kabupaten Sumedang meningkatkan kualitas pendidikan dan sebaran lapangan pekerjaan bagi penduduk usia muda.

Tabel 1.1 Kegiatan Utama Penduduk Usia 15 Tahun Keatas Berdasarkan Jenis Kelamin di Kabupaten Sumedang Tahun 2021

Kegiatan Utama/Main Activity	Jenis Kelamin/Gender		
	Laki-laki Male	Perempuan Female	Jumlah Total
(1)	(2)	(3)	(4)
I. Angkatan Kerja/Economically Active	379 601	260 266	639 867
1. Bekerja/Working	342 809	238 288	581 097
2. Pengangguran Terbuka/Unemployment	36 792	21 978	294 136
II. Bukan Angkatan Kerja/Economically Inactive	82 070	212 066	294 136
1. Sekolah/Attending School	n/a	n/a	n/a
2. Mengurus Rumah Tangga/Housekeeping	n/a	n/a	n/a
3. Lainnya/others	n/a	n/a	n/a
Jumlah/Total	461 571	472 332	934 003
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja/Economically Active Participation Rate	74,25	50,45	62,22
Tingkat Pengangguran/Unemployment Rate	9,69	8,44	9,18

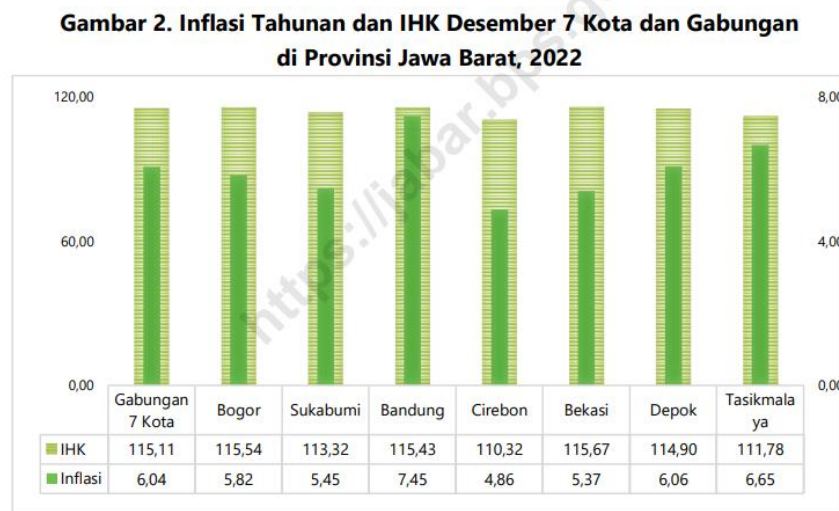
Sumber: Badan Pusat Statistik Kabupaten Sumedang (diolah peneliti), diakses pada 15 Januari 2023

Tabel 1.1 menunjukkan bahwasannya Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Kabupaten Sumedang sebanyak 62,22%. Adapun pada tingkat pengangguran Kabupaten Sumedang menyumbang angka sejumlah 9,18%. Dengan jumlah tersebut TPAK Kabupaten Sumedang masih dibawah rata-rata TPAK jika dibandingkan dengan rata-rata TPAK di Provinsi Jawa Barat yang berjumlah 66,15%. Tentunya hal ini menjadi tanggung jawab pemerintah daerah untuk mendorong angka partisipasi kerja yang ada di Kabupaten Sumedang.

Pada tingkat kesejahteraannya berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Jawa Barat, presentase penduduk miskin di Kabupaten Sumedang menduduki urutan ke-6 se-Jawa Barat dengan presentase penduduk miskin sebanyak 10,71% dan jumlah garis kemiskinan per kapita sebesar Rp. 360.054. Adapun pada tahun 2022 Kabupaten Sumedang mengalami peningkatan kemiskinan sehingga menduduki urutan ke-7 se-Jawa Barat dengan presentase penduduk miskin sebesar 10,26% dan jumlah garis kemiskinan per kapita sebesar Rp. 353.092. Rendahnya pendapatan per kapita yang dimiliki oleh Kabupaten Sumedang memiliki pengaruh terhadap tingkat daya beli masyarakatnya, pendapatan yang rendah menyebabkan kemampuan daya beli masyarakat menurun sehingga dapat berimbas pada pertumbuhan ekonomi,

Selain disebabkan oleh adanya pendapatan yang rendah, daya beli masyarakat juga dapat mengalami penurunan disebabkan adanya angka inflasi yang tinggi, kenaikan harga yang terus menerus terjadi berdampak pada penurunan daya beli masyarakat. Saat inflasi terjadi masyarakat mau tidak mau harus mengeluarkan lebih banyak uang daripada yang seharusnya untuk dapat membeli harga barang atau jasa yang biasa dibeli dengan harga yang rendah. Penurunan daya beli masyarakat tentunya berakibat pada penurunan pendapatan daerah, dengan turunnya pendapatan daerah tentu dapat berdampak pula pada terhambatnya pembangunan daerah.

Gambar 1.1 Inflasi Tahunan dan IHK Desember 7 Kota dan Gabungan di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022

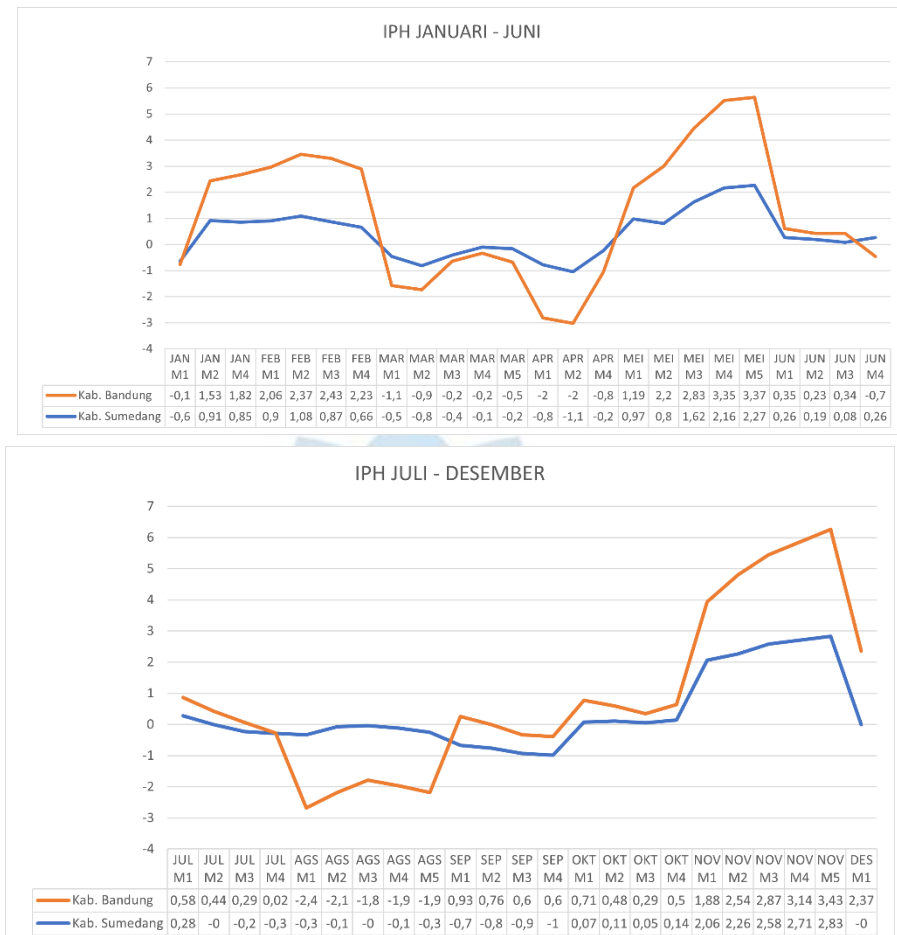


Sumber : BPS Provinsi Jawa Barat, 2022

Sumber: Badan Pusat Statistik Data Perkembangan Tingkat Inflasi di Provinsi Jawa Barat Tahun 2022, diakses pada 15 Januari 2023

Berdasarkan Gambar 1.1 dalam perhitungan inflasi di Provinsi Jawa Barat, Kabupaten Sumedang tidak termasuk kedalam tujuh wilayah yang dihitung Indeks Harga Konsumen (IHK) dan tingkat inflasinya. Hanya ada tujuh kota yang dihitung inflasi dan IHK tahunannya, diantaranya Kota Bogor, Kota Sukabumi, Kota Bandung, Kota Cirebon, Kota Bekasi, Kota Depok dan Kota Tasikmalaya. Dengan kondisi tersebut dalam perhitungan inflasinya Kabupaten Sumedang diaglomerasikan dengan wilayah terdekat yaitu Kabupaten Bandung. Meskipun demikian tentu aglomerasi yang dilakukan tidak dapat mencerminkan kondisi *real* yang ada Kabupaten Sumedang sebab dilihat dari kondisi ekonominya pun memiliki perbedaan yang cukup jauh dengan wilayah aglomerasi, sehingga kondisi ini menjadi tantangan tersendiri bagi Kabupaten Sumedang untuk menjaga kestabilan inflasi ditengah tantangan ketersediaan data yang ada.

Grafik 1.2 Perbandingan IPH Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung



Sumber: Dokumen TPID Kab. Sumedang Tahun 2022 (diolah peneliti)

Grafik 1.2 merupakan grafik yang menunjukkan adanya perbandingan antara IPH Kabupaten Sumedang dengan Kabupaten Bandung. Kabupaten Bandung merupakan wilayah yang dijadikan sebagai wilayah rujukan bagi Kabupaten Sumedang untuk memotret keadaan inflasinya. Namun demikian apabila dilihat secara cermat, keadaan ekonomi yang ada di Kabupaten Bandung dengan Kabupaten Sumedang memiliki perbedaan yang cukup jauh sehingga dalam rujukannya Kabupaten Sumedang belum memiliki data pembandingan yang hampir sama atau setara dengan keadaan ekonomi di wilayahnya sendiri. Berdasarkan latar belakang dan data yang ditampilkan

dapat terlihat bahwa pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang memiliki permasalahan karena terdapat kesukaran teknis dalam perhitungan data yang tentu memiliki pengaruh dalam memutuskan pelaksanaan kebijakan pengendalian yang tepat di Kabupaten Sumedang.

Berdasarkan latar belakang dan uraian permasalahan yang peneliti jabarkan, peneliti tertarik untuk mencari tahu dan meneliti lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang dalam upaya penguatan daya beli masyarakat melalui judul penelitian **“Pelaksanaan Kebijakan Pengendalian Inflasi dalam Upaya Penguatan Daya Beli Masyarakat di Kabupaten Sumedang”**.

B. Identifikasi Masalah

Terdapat identifikasi masalah yang menjadi bahan dasar penelitian, diantaranya:

1. Tingkat kemiskinan di Kabupaten Sumedang masih berada pada urutan sepuluh besar tingkat Kabupaten/Kota di Jawa Barat, hal ini mencerminkan bahwasannya pendapatan masyarakat di Kabupaten Sumedang dapat berpengaruh terhadap tingkat konsumsi dan daya belinya.
2. Kabupaten Sumedang merupakan salah satu wilayah yang tidak dihitung inflasi dan IHK tahunannya sehingga cukup sulit untuk dapat memetakan kondisi *real* terkait inflasi dan IHK yang ada di wilayah Kabupaten Sumedang.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang dan permasalahan yang diusung peneliti, peneliti membatasi masalah-masalah yang dengan rumusan sebagai berikut:

1. Bagaimana permasalahan yang dihadapi Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakatnya?
2. Bagaimana kemampuan kebijakan dapat menstruktur proses pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang?
3. Apa saja variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang?

D. Tujuan Penelitian

Berikut merupakan uraian tujuan penelitian yang ingin peneliti capai, diantaranya:

1. Melalui penelitian ini peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi sebagai upaya penguatan daya beli masyarakatnya. Dengan mengetahui masalahnya, peneliti bermaksud untuk mengetahui bagaimana penanggulangan yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang.
2. Peneliti bermaksud untuk mengetahui kemampuan kebijakan dapat menstruktur proses pelaksanaan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang.
3. Dengan mengetahui variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses pelaksanaan pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang, peneliti dapat mengetahui daya dukung apa saja yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam

pelaksanaan kebijakannya sehingga dapat mengetahui dampak daya dukung tersebut terhadap upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang.

E. Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian pada penelitian ini terdiri dari manfaat akademis dan manfaat praktis, adapun uraiannya ialah:

1. Manfaat Akademis

Melalui penelitian ini peneliti memiliki harapan untuk memberikan wawasan mengenai bagaimana pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan yang diambil sebagai dasar teori penelitian. Adapun harapan lainnya, dengan adanya penelitian ini peneliti berharap setidaknya dapat dijadikan acuan penelitian pada penelitian sejenis khususnya di bidang Administrasi Publik.

2. Manfaat Praktis

Bagi peneliti, penelitian ini diharapkan dapat memberi pemahaman mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang. Bagi pembaca, diharapkan penelitian ini dapat menjadi bahan pengembangan keilmuan di masa yang akan datang. Adapun untuk manfaat praktis, kedepannya semoga dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dan bahan diskusi oleh Pemerintah Kabupaten Sumedang dalam upaya mendorong peningkatan pendapatan, penguatan daya beli, serta pengendalian inflasi yang nantinya diharapkan dapat memberikan perbaikan pada perekonomian di Kabupaten Sumedang.

F. Kerangka Pemikiran

Kerangka berpikir digunakan sebagai landasan sistematis yang berguna sebagai pedoman dalam membahas permasalahan yang dibahas didalam penelitian. Penelitian ini bermaksud untuk membahas mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang dengan menggunakan teori implementasi kebijakan. Teori implementasi kebijakan sebagai *applied theory* merupakan teori yang berkaitan dengan *middle range theory* yaitu rumpun kajian kebijakan publik yang terdapat pada keilmuan administrasi publik sebagai *grand theory*. Penelitian ini membahas mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi di Kabupaten Sumedang yang merujuk pada Keputusan Bupati Sumedang Nomor 505 Tahun 2022 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Kabupaten Sumedang.

Sebagai alat analisis, peneliti menggunakan teori implementasi kebijakan oleh Daniel A. Mazmanian dan Paul Sabatier (dalam Kasmad, 2013) yang memiliki tiga dimensi, yaitu: (1) mudah/tidaknya masalah dikendalikan, berkenaan dengan indikator masalah teori dan teknis pelaksanaan, keragaman objek dan perubahan seperti apa yang dikehendaki; (2) kemampuan kebijakan menstruktur proses implementasi, yaitu kemampuan keputusan kebijakan untuk menstrukturkan secara tepat proses implementasi dengan indikator kejelasan dan konsistensi tujuan, dipergunakan teori kausal, ketepatan alokasi sumber dana, keterpaduan hierarkis diantara lembaga pelaksana, aturan pelaksana dari lembaga pelaksana, dan keterbukaan kepada pihak luar; (3) variabel diluar kebijakan yang mempengaruhi proses implementasi, yang mana terdiri dari beberapa indikator diantaranya sosio-ekonomi dan teknologi, dukungan publik, sikap dan sumber-sumber yang dimiliki kelompok, dukungan dari pejabat atasan, komitmen dan kemampuan kepemimpinan pejabat pelaksana.

Adapun gambaran pemikiran mengenai pelaksanaan kebijakan pengendalian inflasi dalam upaya penguatan daya beli masyarakat di Kabupaten Sumedang, dapat dilihat sebagai berikut:



Gambar 1.2 Kerangka Berpikir



Sumber: diolah peneliti (15 Januari 2023)